

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Adi, Rianto, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta .
- Anand, R.P., 1983 *Origin and Development of the Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publisher, Hague.
- Arsana, I. M. A., 2007, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gavouneli , Maria, 2007, *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Djalal, Hasyim, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Harjono, J. M., 1971, *Indonesia Land and People*, Gunung Agung, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung.
- , 1986, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung.
- , 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- , 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama adengan PT Alumni, Bandung.
- Mangone, Gerard J., 1981, *Law for the World Ocean*, Stevens and Sons, London.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchijiddin , A. M., 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sodik, D. M., 2015, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Artikel, Berita, Makalah dan Sumber Internet

Badan Pusat Statistik, 2017, “Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017”, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Caron, David D., 1990, “When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level”, *Ecology Law Quarterly Vol. 17*, Berkeley University.

Djajaatmadja, Bambang Iriana, 2005, *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Food Agriculture Organization, 2016, *FAO Fisheries and Agriculture, Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations*.

H.Z. Abidin, 2001, “Beberapa Pemikiran Tentang Penetapan dan Penegasan Batas di Laut”, *Geo-Informatika Jurnal Vol. 8 No. 2 – 3*, Geo-Informatika, Jakarta.

Humas Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb>, “Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB”, diakses pada 27 Maret 2018.

Kementerian Dalam Negeri, <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah>, “DAU Pegang Peranan Penting untuk Pembangunan Daerah”, diakses pada 11 Juli 2018.

Rep-Mat, <http://jabarprov.go.id/En/index.php/news/4597/2017/11/03/Indonesia-is-Maritime-Country-with-the-Worlds-Largest-Islands>, “Indonesia is Maritime Country with the World’s Largest Islands”, diakses pada 07 Mei 2018.

Suhelmi, Ifan R., Restu Nur Afiati dan Hari Prihatno, 2013, *Penentuan Garis Pantai Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Mendukung Pengelolaan Pesisir dan Laut*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir Balitbang KP, Jakarta.

V., Andriati, 2007, *Kajian Legal Coastline dalam mendukung Pelaksanaan Kadaster Laut di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten Pati)*, Tesis, Program Magister Teknik Geodesi dan Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Bandung.

World Wildlife Fund – Indonesia, <https://www.wwf.or.id/?26820/tantangan-blue-economy-untuk-indonesia>, “*Tantangan Blue Economy untuk Indonesia*”, diakses pada 08 Mei 2018.

C. Perjanjian Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.